



## Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

URL: <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>



# Political Connection dalam Kajian Filsafat Ilmu

Purwanto Purwanto<sup>a,1,\*</sup>, Mugi Harsono<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>1</sup> anto.c412@gmail.com\*; <sup>2</sup> mugiharsono\_fe@staff.uns.ac.id

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 6 Juli 2022

Revised : 15 September 2022

Accepted : 28 September 2022

#### Keywords

Philosophy of science

political connections

Ontology

Epistemology

Axiology

#### Kata Kunci

Filsafat ilmu

Political connection

Ontologi

Epistemologi

Aksiologi

### ABSTRACT

Political connection in the study of philosophy of science. The purpose of this paper is to examine the philosophical aspects, namely: ontology, epistemology, and axiology on construct political relations that have been attention of scientists in the field of financial management and accounting. This paper is a conceptual paper, using a literature study approach by mapping previous research related to political relations in the article Scopus and Google Scholar indexed journals for the last three decades. The results of this study find the consequences of political connections are firm value, financial performance, non-financial performance, agency problems, business life choices, auditor choice and audit quality, corporate environment and corporate strategy. This paper proposes a research scheme that shows the effect of political relations on firm value moderated by firm size, firm age and type of firm.

#### ABSTRAK

Political connection dalam kajian filsafat ilmu. Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji aspek-aspek filosofis, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada konstruk political connection yang telah menjadi perhatian ilmuwan di bidang manajemen keuangan dan akuntansi. Tulisan ini merupakan paper konseptual, menggunakan pendekatan survei literatur dengan memetakan penelitian sebelumnya terkait political connection di artikel jurnal terindeks Scopus dan Google Scholar selama tiga dekade terakhir. Hasil penelitian ini menemukan konsekuensi dari political connection adalah nilai perusahaan, kinerja keuangan, kinerja non keuangan, masalah keagenan, kelangsungan hidup bisnis, pilihan auditor dan kualitas audit, lingkungan perusahaan dan strategi perusahaan. Tulisan ini mengusulkan skema model penelitian yang menunjukkan pengaruh political connection terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh ukuran perusahaan, umur perusahaan dan jenis perusahaan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Hubungan antara dunia bisnis dan politik memang sangat erat, apalagi di zaman sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian sebagian besar kegiatan ekonomi saat ini tidak lepas dari nuansa politik, bahkan hampir setiap aspek kehidupan saat ini dikaitkan dengan politik. Hubungan politik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memperlancar (memuluskan) pekerjaan apapun. Koneksi politik dianggap sebagai salah satu sumber bisnis yang paling berharga, karena asosiasi antara perusahaan dan politik diyakini dapat menghindari pajak (Wicaksono, 2017). Bukti masalah keterkaitan antara kegiatan bisnis dan politik ada di seluruh dunia (Bianchi & Viana, 2014; Faccio, 2006)

Schaffer (1995) mengemukakan bahwa studi tentang pengaruh politik dalam kegiatan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat mikro dan makro. Tingkat mikro, biasanya secara langsung disebut sebagai tingkat perusahaan atau tingkat organisasi, adalah tingkat analisis yang lebih dominan digunakan oleh para sarjana manajemen, bisnis dan keuangan. Analisis tingkat makro, seperti komunitas, industri, kelas sosial, dan masyarakat, sebagian besar digunakan dalam ilmu politik, ekonomi publik dan sosiologi.

Banyak literatur yang membahas tentang koneksi politik perusahaan khususnya di bidang keuangan dan ekonomi. Pembahasan koneksi politik di Indonesia muncul sejak Raymond Fisman (2001) menerbitkan makalah yang memperkirakan nilai koneksi politik untuk perusahaan dengan mempelajari perusahaan Indonesia. Kebanyakan makalah empiris menyelidiki dampak menjadi perusahaan yang terhubung secara politik, meskipun ada juga beberapa makalah memberikan penjelasan teoritis tentang yang ada (anteseden) dan hasil keterkaitan politik untuk perusahaan. Tinjauan literatur tentang manfaat (akses ke sumber pembiayaan, kinerja perusahaan, hak istimewa pemerintah) dan kerugian (inefisiensi, anggota dewan perusahaan tidak memenuhi syarat, menurunkan nilai perusahaan) hubungan politik untuk perusahaan sudah pernah diteliti (Berkman & Galpoththage, 2016; Bertrand et al., 2018; C. R. Chen et al., 2017; Hu et al., 2020; Legitimate, 2014; Nys et al., 2014; W. Qian & Chen, 2021; Ren et al., 2022; Sutopo et al., 2017) bahkan peneliti lain (Putra & Harymawan, 2021) telah melakukan pemetaan artikel *political connection* berdasarkan jenis sampel, publikasi jurnal dan tahun terbit, namun kajian *political connection* dalam filsafat ilmu belum ada sehingga masih diperlukan penelitian yang mengkaji *political connection*, dalam aspek ontologi, epistemologi juga aksiologi yang merupakan aspek yang menarik untuk penelitian bidang manajemen keuangan dan akuntansi.

Beberapa peneliti telah memperkenalkan konsep aktivitas politik perusahaan yang sampai batas tertentu dapat dianggap tumpang tindih dengan istilah koneksi politik perusahaan (Bianchi & Viana, 2014; Hillman et al., 2009; Hillman & Hitt, 1999; Ozer et al., 2010). Akan tetapi, keduanya dapat dipisahkan dengan membedakan antara aktivitas dan keterikatan (Sutopo et al., 2017). Oleh karena itu, itu dapat dikatakan bahwa aktivitas politik perusahaan lebih pada upaya, seperti kegiatan melobi oleh perusahaan untuk menghadapi situasi politik (Hilman et al., 2004), sedangkan koneksi politik perusahaan adalah sejauh mana sebuah perusahaan (pemegang saham, pejabat perusahaan) dekat dengan kekuasaan politik (Bianchi & Viana, 2014).

Perusahaan selalu ingin mencapai kinerja yang baik. Kinerja tersebut ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor berkaitan dengan kinerja pasar maupun kinerja akuntansi. Selain transaksi yang dilakukan perusahaan, ada hal-hal yang lain yang seringkali mempengaruhi capaian kinerja perusahaan, salah satu diantaranya adalah koneksi politik. Koneksi politik dalam perusahaan itu penting (C. meng Chen et al., 2013) dan dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi banyak bisnis (C. meng Chen et al., 2013; Raymond Fisman, 2001). C. meng Chen et al. (2013) menyatakan bahwa hubungan politik dalam perusahaan akan mempengaruhi beberapa aspek, seperti transaksi pencarian pinjaman, pinjaman terkait, konsep kontrol dan nilai, manipulasi, keterlibatan terkait dengan jaringan kredit, tekanan keuangan, serta penciptaan lapangan kerja dan seleksi kerja atau proyek. Bisnis atau perusahaan yang terhubung secara politik memiliki kemudahan dan fasilitas dalam bertransaksi (Faccio, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruk *political connection*, dalam aspek ontologi, epistemologi juga aksiologi yang menjadi aspek yang menarik untuk penelitian bidang manajemen keuangan dan akuntansi. Bagian selanjutnya dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur, metodologi, temuan, dan kesimpulan.

## 2. Kajian Literatur

Bagian kajian literatur akan membahas tiga aspek kajian filsafat ilmu, dilihat dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi konstruk *political connection*. Ontologi merupakan suatu kajian yang menjawab pertanyaan “apa”, sehingga penelitian ini bersifat fundamental dan langkah awal sebelum membahas hal-hal lain. Aspek epistemologis berkaitan dengan pencarian pengetahuan yang berbeda mengenai jawaban “apa” dalam kajian ontologis. Sedangkan aspek aksiologi merupakan kajian tentang manfaat dan kegunaan pembahasan suatu topik, apakah dapat bermanfaat dan berdaya guna ataukah tidak mampu memberikan manfaat dan tidak berguna.

### 2.1 Aspek Ontologi Political Connection

Aspek ontologi yang dikaji dalam tulisan ini terdiri dari tiga hal, yaitu apa hakikat *political connection*, unsur-unsur *political connection*, dan karakteristik *political connection*. Konsep *political connection* merupakan istilah baru dalam literatur manajemen dalam beberapa tahun terakhir.

### 2.2 Hakikat Political Connection

Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani : “*polis*” yang berarti kota yang dengan status negara kota. Di kota-kota Yunani kuno, orang-orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran dalam hidup mereka. Politik yang berkembang di Yunani kuno dapat dipahami sebagai proses interaksi individu dengan individu lain demi kepentingan bersama. Pemikiran politik terutama di dunia barat sangat dipengaruhi oleh para filosof Yunani kuno. Plato dan Aristoteles melihat politik sebagai suatu upaya untuk mencapai pemerintahan yang terbaik (Aristoteles, 2020). Akan tetapi, definisi politik sebagai hasil pemikiran para filosof tersebut gagal memberikan tekanan pada upaya-upaya praktis dalam mencapai politik yang baik. Diakui, ide-ide politik yang berkembang saat ini tidak terlepas dari pengaruh para filosof tersebut

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik memaknai politik dalam berbagai cara untuk memperkaya pemikiran tentang politik. Almond (1965) mengartikan politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu dalam lingkup tertentu, di mana kontrol ini didukung oleh alat-alat (*instrument*) wewenang dan adanya paksaan. Dari pengertian tersebut, politik terkait erat dengan proses pengambilan keputusan publik. Penekanan ditempatkan pada penggunaan alat wewenang dan paksaan dalam pembuatan keputusan publik mengenai siapa yang berwenang, bagaimana wewenang tersebut digunakan, dan apakah tujuan dari sebuah keputusan yang telah disepakati. Jika dirunut satu tema yang sama, maka definisi politik menurut Almond (1965) tidak dapat memisahkan interaksi di dalam pemerintahan (politik) untuk menyatukan siapa saja yang memiliki otoritas pemerintahan dalam pengambilan keputusan publik.

Heywood (2002) mengemukakan politik merupakan kegiatan suatu Negara untuk menciptakan, memelihara, dan memodifikasi aturan-aturan umum yang mengatur kehidupannya, artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan koherensi kerja. Dengan definisi tersebut, Heywood (2002) secara implisit mengungkapkan bahwa pemerintah (politik) dalam proses pengambilan keputusan interaktif publik, masih ada konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Dengan kata lain, setiap kelompok saling mempengaruhi sehingga suatu keputusan publik yang disepakati adalah untuk kepentingan kelompok tertentu. Hakikat koneksi politik (*political connection*) dalam bisnis menunjuk pada definisi *political connection* itu sendiri. Terdapat banyak definisi terkait dengan *political connection*, antara lain : *political connection* dapat dianggap sebagai situasi di mana setidaknya salah satu eksekutif puncak perusahaan, pemegang saham perusahaan dengan persentase besar, atau anggota keluarga orang tersebut adalah politisi senior atau politisi terkemuka (Bao et al., 2016; Faccio, 2006; Luo et al., 2016; W. Qian & Chen, 2021). Adhikari menambahkan bahwa kepemilikan langsung pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk koneksi politik (Adhikari et al., 2006). Dengan demikian koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah.

### 2.3 Konsep Political Connection

Untuk memberikan gambaran tentang apakah itu politik, berikut ini akan diuraikan konsep-konsep kunci yang mendasari konstruk politik. Budiarto (1977) berpendapat bahwa konsep utama politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan distribusi atau alokasi. Budiarto (1977)

menyatakan politik sebagai berikut : "berbagai macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan kebijakan publik mengenai pengaturan dan distribusi atau alokasi sumber daya yang tersedia. Untuk menerapkan kebijakan ini, kekuasaan dan wewenang harus digunakan untuk mempromosikan kerjasama dan menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses tersebut.

#### 2.4 Karakteristik Political Connection

Sebuah perusahaan didefinisikan sebagai berafiliasi secara politik jika presiden (CEO) perusahaan tersebut adalah pejabat pemerintah saat ini atau sebelumnya (Ren et al., 2022; Wu et al., 2012). Industri yang berafiliasi secara politik adalah perusahaan di mana setidaknya salah satu dari pemegang saham mayoritas adalah anggota dewan direksi, dewan eksekutif, atau manajemen perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik atau memegang posisi pejabat negara atau anggota parlemen (Bao et al., 2016; Berkman & Galpoththage, 2016; Bombardini & Trebbi, 2020; Faccio, 2006; Luo et al., 2016).

#### 2.5 Aspek Epistemologi Political Connection

Kajian aspek epistemologis yang berkaitan dengan konstruk *political connection* termasuk teori-teori *political connection*, dan prinsip-prinsip *political connection*.

#### 2.6 Teori-Teori Political Connection

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan *political connection*. Teori pertama yaitu teori keagenan yang awalnya dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan menekankan adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberi kuasa kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen adalah pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan prinsipal. Dalam sebuah perusahaan, manajemen yang berperan sebagai "agen", terkadang bertindak untuk kepentingannya sendiri, dan bukan sebagai pihak yang berhati-hati, bijaksana dan adil kepada pemegang saham.

Perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan yang timbul antara prinsipal dan agen ini dapat menimbulkan masalah keagenan. Agen sebagai penanggung jawab pengelolaan perusahaan memiliki banyak informasi tentang kemampuan perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Di sisi yang lain, prinsipal hanya mendapatkan informasi yang sedikit tentang situasi operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara principal dan agen yang dikenal dengan istilah "asimetri informasi". Konsep asimetri informasi adalah adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh distribusi informasi yang tidak merata antara principal dan agen. Prinsipal harus memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan agen. Akan tetapi informasi tentang ukuran keberhasilan agen tidak disajikan secara lengkap sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tidak lengkap.

Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi oleh tingkat leverage perusahaan. Menurut agency theory, tingkat leverage yang tinggi dapat menjadi cara salah satu bagi prinsipal untuk mencegah agen bertindak oportunistik. Akan tetapi, perusahaan publik dengan tingkat hutang yang cukup tinggi juga menunjukkan adanya risiko tinggi atas kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Belghitar et al. (2019) membuktikan perusahaan berafiliasi secara politik memiliki tingkat utang yang tinggi, memiliki kewajiban jangka panjang, memegang uang tunai dalam jumlah besar dan memiliki informasi keuangan yang berkualitas buruk.

Berdasarkan perspektif *resource dependence theory* dari Pfeffer & Salancik (1978), anggota dewan yang terkoneksi politik dalam perusahaan akan mengurangi risiko eksternal perusahaan (khususnya dari pemerintah), meningkatkan ketahanan bisnis, dan terbukti mempercepat transaksi bisnis (Bao et al., 2016; Berkman & Galpoththage, 2016; Hillman et al., 2009; Luo et al., 2016). Makin banyak anggota dewan yang terkoneksi politik maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Sebaliknya, pandangan teori keagenan menyatakan bahwa hubungan politik dalam perusahaan dapat menyebabkan biaya tinggi atas masalah agensi (Belghitar et al., 2019). Perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai kecenderungan sebagai perusahaan yang berani mengambil risiko (Ling et al., 2016) dan lebih mungkin untuk gagal (Johnson & Mitton, 2003). Kinerja perusahaan yang terkoneksi politik makin menurun ketika makin banyak anggota dewan yang terkoneksi politik karena adanya peningkatan alokasi sewa blockholder (Sun et al., 2014).

Menurut teori institusional, bisnis adalah berakar dalam dan menanggapi berbagai konteks (lembaga politik, sistem hukum, budaya), dan perilaku mereka perlu memenuhi harapan lingkungan kelembagaan (Meyer & Rowan, 1977). Koneksi politik memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan tujuan lingkungan dan kebijakan negara dengan perusahaan dan mobilisasi perusahaan untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut (Lei dan Nugent, 2018). Koneksi politik menyediakan saluran formal bagi pemerintah untuk mentransfer tujuan tata kelola lingkungan ke berbagai perusahaan (Xu & Yan, 2020).

## 2.7 Prinsip dari Political Connection

Beberapa peneliti (Bao et al., 2016; Berkman & Galporthage, 2016; Bertrand et al., 2018; Faccio, 2006) menegaskan bahwa sebuah perusahaan terhubung secara politik jika salah satu pemegang saham utama atau manajer seniornya adalah: (1) Anggota parlemen perusahaan, yang dapat terhubung dengan anggota kongres dalam dua cara. Pertama, setidaknya satu pejabat tinggi mereka bisa duduk di parlemen nasional. Kedua, perusahaan diklasifikasikan sebagai terkait ketika setidaknya satu pemegang saham utama adalah anggota parlemen. Pemegang saham mayoritas didefinisikan sebagai seseorang yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan setidaknya 10% dari suara pemegang saham. (2) Menjabat sebagai Menteri atau Kepala Negara. Ada tiga jenis hubungan dengan menteri atau kepala negara : sebagai pelayan publik, sebagai pemegang saham mayoritas, atau melalui keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga dapat berupa pasangan, anak-anak, saudara kandung, maupun orang tua. (3) Memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi. Jenis koneksi ini muncul ketika orang tersebut menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri (atau seseorang yang dekat dengan mereka) yang juga merupakan eksekutif senior atau pemegang saham utama dari sebuah perusahaan; ketika pemegang saham utama atau pejabat publik senior adalah teman menteri atau wakil menteri; dimana pemegang saham utama atau pejabat senior adalah seorang politisi dari negara lain atau dimana pemegang saham utama atau pejabat senior diketahui berafiliasi dengan partai politik.

## 2.8 Aspek Aksiologi Koneksi Politik (*Political Connection*)

Aspek aksiologi yang dibahas dalam tulisan ini mencakup kegunaan dari *political connection* dalam kehidupan. Penelitian Cao et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik mengalami *underpricing* IPO yang jauh lebih rendah. Hubungan politik yang berfungsi sebagai mekanisme kompensasi umum untuk kekurangan institusional, membantu mengurangi tingkat *underpricing* IPO non-BUMN. Hasil penelitian (D. Chen et al., 2017; Luo et al., 2016; Wicaksono, 2017) yang dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa perusahaan yang berafiliasi secara politik menerima insentif dan perlakuan berbeda untuk pengadaan publik seperti pemasaran, akses yang lebih mudah ke dana publik, seperti pembebasan pajak. Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah untuk pembiayaan pinjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan menerima kontrak pemerintah. Beberapa perusahaan yang terkoneksi politik dapat dengan mudah memperoleh pendanaan utang dengan mendapatkan memo pinjaman dari politisi.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *literature review* dengan memetakan penelitian-penelitian sebelumnya yang melibatkan hubungan politik (*political connection*) selama tiga dekade terakhir diakses dari Scopus dan Google Scholar menggunakan kata "*political connection*" dan "*consequences of corporate political connections*".

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dunia bisnis dan politik tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Dengan adanya koneksi politik, perusahaan memiliki peluang bisnis yang lebih besar dikarenakan adanya kemudahan bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk mendapatkan proyek-proyek dan akses pada kebijakan pemerintah (Boubakri et al., 2008). Wulandari & Raharja (2013) juga menyatakan bahwa bisnis dan politik memiliki hubungan satu sama lain. Tujuan politik adalah untuk membuat kebijakan publik, bahkan untuk kepentingan dunia usaha, sedangkan dunia usaha dapat mendukung kebijakan suatu negara.

Perusahaan yang berafiliasi secara politik mendapatkan hak istimewa, seperti mencegah mereka dari kompetisi, mempersulit industri lain untuk masuk, dan mendapatkan kemudahan dalam akses sumberdaya. Disisi lain, dengan adanya koneksi politik bisa menjadi beban bagi perusahaan, karena perusahaan bergantung pada kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih rentan terhadap isu-isu politik (Sutopo et al., 2017). Hubungan politik tidak hanya mengubah strategi keuangan perusahaan, tetapi juga kinerja jangka panjangnya. Jelas, perusahaan yang berafiliasi secara politik mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan pemerintah baru ketika pelanggan mereka dari pemerintah lama telah jatuh dari kekuasaan akan berkinerja lebih buruk dibawah pemerintahan yang baru dan akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan keuangan perusahaan (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006).

Faccio (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis suatu perusahaan, khususnya untuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan sistem hukum yang lemah. Afiliasi politik adalah hal yang biasa di Indonesia. Umumnya hal ini dilakukan dengan menempatkan individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah (baik komisaris maupun direksi) dalam struktur organisasi perusahaan, (Raymond Fisman, 2001). Hasil penelitian Raymond Fisman (2001) tentang koneksi politik pada era kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia menyatakan bahwa investor mengaku panik saat Presiden Soeharto diminta turun dari kursi kepresidenan, karena investor yang selama ini mempunyai koneksi politik dengan Soeharto mendapat kemudahan dalam pembiayaan usaha.

Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Raymond Fisman, 2001). Latar belakang politik mempengaruhi kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan swasta dan BUMN. Ini memiliki efek positif dan negatif (Li et al., 2008). Koneksi politik dari sebuah perusahaan adalah umum di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, sistem transparan, dan pembatasan investasi asing oleh penduduk. Sementara itu koneksi politik kurang umum di negara-negara yang memiliki peraturan yang menetapkan batas-batas yang lebih ketat pada konflik kepentingan politik (Faccio, 2006)

Wulandari & Raharja (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik memberikan dorongan untuk dilakukannya sebuah penelitian mengenai koneksi politik dan kinerja perusahaan sebab salah satu sumber keuangan partai politik ialah sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha.

Pengaruh koneksi politik suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan begitu penting untuk memahami hubungan antara politisi dengan perusahaan serta pengaruhnya terhadap efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keberhasilan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan politik (Wicaksono, 2017). Perusahaan yang mempunyai koneksi politik biasanya mendapatkan keuntungan dari koneksi yang mereka miliki atas pembayaran yang mereka lakukan, menyembunyikan atau melakukan penundaan laporan (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006).

Praktek menggunakan pengaruh politik dalam perusahaan telah menunjukkan bahwa pengaruh politik adalah alat yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Goldman et al., 2009). Perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai lebih banyak sumber daya dan keunggulan kompetitif untuk perusahaan yang mengakibatkan kinerja masa depan lebih baik (Mohammed et al., 2017). Penelitian Ding et al.(2014) menemukan bukti bahwa afiliasi politik menguntungkan kinerja perusahaan seperti mencegah pesaing untuk masuk kedalam industri yang sama, tarif pajak yang lebih rendah, serta pinjaman bank yang dimudahkan. Perusahaan yang terkoneksi politik biasanya mempunyai posisi keuangan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik (Jaffar & Abdul-Shukor, 2016). Anggota dewan independen yang terkoneksi politik menunjukkan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Wu et al., 2012). Shleifer & Vishny(1994) berpendapat bahwa ikatan politik mendistorsi insentif, kehilangan investasi dan meningkatkan korupsi yang dapat membahayakan nilai pemegang saham. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memerlukan suap saat memulai bisnis. Secara politis perusahaan terhubung lebih mungkin untuk memanipulasi pelaporan statistik kinerja keuangan dalam rangka untuk meminimalkan biaya politik pada perusahaan.

Koneksi politik dipandang sebagai instrumental, memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan berbagai perlakuan istimewa, seperti perpajakan, akses ke sumber daya keuangan dan politik, dan pengawasan peraturan yang longgar, yang semuanya membantu perusahaan mengurangi risiko dan mendapatkan keunggulan kompetitif (Faccio, 2006). Hal ini terutama terjadi di negara berkembang di mana peraturan mengenai ikatan politik dengan bisnis umumnya kurang ketat (Bliss & Gul, 2012; Faccio, Dinç, et al., 2006). Mengingat dukungan kelembagaan formal yang tidak memadai, koneksi politik manajerial sangat penting dalam mengakses sumber daya yang langka (Gao et al., 2019; Leuz & Oberholzer-Gee, 2006; Ling et al., 2016), mengendalikan ketidakpastian lingkungan (Luo et al., 2016; Zhang et al., 2019) dan meningkatkan kinerja perusahaan (Adler & Kwon, 2002; Burt & Opper, 2020). Perusahaan mengambil keuntungan dari ikatan politik mereka dari memperoleh pembentukan melalui saran dan konsultasi, menjembatani lingkungan eksternal, memperoleh posisi yang menguntungkan dalam memperoleh sumber, dan membawa legitimasi untuk kegiatan operasi tertentu (Hillman et al., 2009). Dengan demikian, membentuk koneksi politik umumnya menguntungkan pengambilan keputusan dan operasi strategis perusahaan sebagai alternatif dukungan kelembagaan formal yang tidak memadai dalam ekonomi yang sedang berkembang

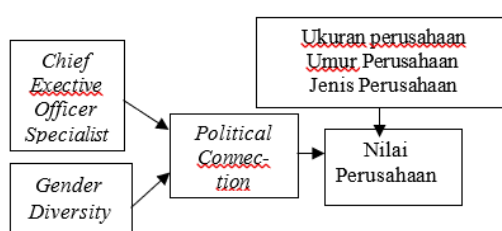
Tiga fungsi utama dari koneksi politik mempengaruhi hubungan antara koneksi politik dan kinerja inovasi perusahaan. Pertama, koneksi politik dapat menghasilkan sumber daya diperlukan untuk inovasi. Ikatan dengan pemerintah membuat komunikasi perusahaan lebih efisien dan efektif. Perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat mampu menjadi lebih inovatif dengan anak perusahaan dan modal intelektual yang diperoleh dari pemerintah (Ren et al., 2022; Tsai et al., 2019). Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk belajar tentang orientasi kebijakan inovasi terlebih dahulu. Perusahaan juga dapat memperoleh lebih banyak pendekatan pembiayaan, menikmati insentif pajak, mendapatkan hak milik perlindungan, dan mendapatkan kualifikasi akses pasar (Faccio, 2006; Hillman & Hitt, 1999; Su et al., 2019; F. Wang et al., 2018; Xu & Yan, 2020). Kedua, koneksi politik dapat mengurangi risiko inovasi. Perusahaan mengatasi lebih banyak ketidakpastian akuisisi sumber daya dengan membaca sinyal arah kebijakan, meningkatkan legitimasi perusahaan, dan mengurangi ketidakstabilan lingkungan eksternal (Holmstrom, 1989; Legitimate, 2014; Li et al., 2008). Ketiga, koneksi politik dapat memfasilitasi keinginan perusahaan untuk kesanggupan untuk berinovasi. Karena inovasi adalah aktivitas yang berisiko dan tahan lama, manfaat dan sumber daya dari koneksi politik dapat meringankan beban perusahaan kekhawatiran dan meningkatkan perhatian publik (Falk, 2007; Lin et al., 2016; Ren et al., 2022).

#### 4.1. Konsekuensi *Political Connection*

*Political connection* dan kemampuannya untuk menjelaskan aktivitas keuangan bisnis telah lama menjadi subjek yang menarik dalam literatur manajemen dan akuntansi, seperti manajemen laba dan kualitas (Chaney et al., 2011; C. J. Chen et al., 2010; H Kara, 2014), pelaporan keuangan (Chaney et al., 2011), tata kelola perusahaan (Goldman et al., 2009; X. Qian et al., 2015), penilaian pasar (Boubakri et al., 2012; He et al., 2014), kinerja perusahaan (Y. Wang et al., 2019), *Initial public offering* (Ferris et al., 2016; Francis et al., 2009), nilai-nilai perusahaan, khususnya, aktivitas keuangan perusahaan, pilihan dan pengungkapan, misalnya (Chaney et al., 2011; He et al., 2014; Yu & Zheng, 2019), pilihan auditor dan kualitas audit (Guedhami et al., 2014), lingkungan perusahaan (W. Qian & Chen, 2021; Xu & Yan, 2020).

*Political connection* terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan dan kehidupan ekonomi perusahaan individu, misalnya (Claessens et al., 2008; Faccio, Masulis, et al., 2006; Ferguson & Voth, 2008; Francis et al., 2009; Li et al., 2008; Sapienza, 2004)

#### 4.2. Usulan Skema Model *Political Connection*



Gambar 1. Skema Model Penelitian

Melalui kerangka kerja dari teori keagenan, teori institusional dan teori pemangku kepentingan serta pemetaan hasil penelitian sebelumnya, tulisan ini mengusulkan skema model seperti yang ditunjukkan pada [gambar 1](#). Pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh ukuran, umur dan jenis perusahaan.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruk *political connection*, dari perspektif ontologi, epistemologis dan aspek aksiologi yang merupakan aspek menarik untuk penelitian bidang keuangan dan akuntansi. Makalah ini juga mengidentifikasi antededen dan konsekuensi dari *political connection*. Kemungkinan adanya *political connection* dapat muncul dari faktor di dalam dan di luar perusahaan. Dampak dari adanya *political connection* yaitu pada nilai perusahaan, kinerja keuangan, kinerja non keuangan, masalah keagenan, kelangsungan hidup bisnis, dan strategi perusahaan. Makalah ini mengusulkan model penelitian *political connection* untuk penyelidikan lebih lanjut: pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh ukuran, umur dan jenis perusahaan.

## Daftar Pustaka

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. *Academy of Management Review*, 27(1), 17–40. <https://doi.org/10.5465/AMR.2002.5922314>
- Bao, X., Johan, S., & Kutsuna, K. (2016). Do political connections matter in accessing capital markets? Evidence from China. *Emerging Markets Review*, 29, 24–41. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.08.009>
- Belghitar, Y., Clark, E., & Saeed, A. (2019). Political connections and corporate financial decision making. In *Review of Quantitative Finance and Accounting* (Vol. 53, Issue 4). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0776-8>
- Berkman, H., & Galpothhage, V. (2016). Political connections and firm value: an analysis of listed firms in Sri Lanka. *Pacific Accounting Review*, 28(1), 92–106. <https://doi.org/10.1108/PAR-06-2014-0020>
- Bertrand, M., Kramarz, F., Schoar, A., & Thesmar, D. (2018). The Cost of Political Connections. *Review of Finance*, 22(3), 849–876. <https://doi.org/10.1093/rof/rfy008>
- Bianchi, M. T., & Viana, R. C. (2014). Political connections: evidence from listed companies in Portugal. *International Journal of Economics and Accounting*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.1504/ijea.2014.060917>
- Bliss, M. A., & Gul, F. A. (2012). Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence. *Journal of Banking and Finance*, 36(5), 1520–1527. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.12.011>
- Bombardini, M., & Trebbi, F. (2020). Empirical models of lobbying. *Annual Review of Economics*, 12, 391–413. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082019-024350>
- Boubakri, N., Cosset, J. C., & Saffar, W. (2008). Political connections of newly privatized firms. *Journal of Corporate Finance*, 14(5), 654–673. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.08.003>
- Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., & Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 18(3), 541–559. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.02.005>
- Burt, R. S., & Opper, S. (2020). Political Connection and Disconnection: Still a Success Factor for Chinese Entrepreneurs. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 44(6), 1199–1228. <https://doi.org/10.1177/1042258719893110>



- Cao, Z., Chen, Y., Zeng, J., & Zhang, Q. (2022). Political connection, family involvement, and IPO underpricing: Evidence from the listed non-state-owned enterprises of China. *Pacific Economic Review*, 27(2), 105–130. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12358>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Chen, C. J., Ding, Y., & Kim, C. (2010). High-level politically connected firms, corruption, and analyst forecast accuracy around the world. *Journal of International Business Studies*, 41(9), 1505–1524. <https://doi.org/10.1057/jibs.2010.27>
- Chen, C. meng, Ariff, M., Hassan, T., & Mohamad, S. (2013). Does a firm's political connection to government have economic value? *Journal of the Asia Pacific Economy*, 18(3), 477–501. <https://doi.org/10.1080/13547860.2012.742674>
- Chen, C. R., Li, Y., Luo, D., & Zhang, T. (2017). Helping hands or grabbing hands? An analysis of political connections and firm value. *Journal of Banking and Finance*, 80, 71–89. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.03.015>
- Chen, D., Guan, Y., Zhang, T., & Zhao, G. (2017). Political connection of financial intermediaries: Evidence from China's IPO market. *Journal of Banking and Finance*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.11.023>
- Claessens, S., Feijen, E., & Laeven, L. (2008). Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. *Journal of Financial Economics*, 88(3), 554–580. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.11.003>
- Ding, S., Jia, C., Wu, Z., & Zhang, X. (2014). Executive political connections and firm performance: Comparative evidence from privately-controlled and state-owned enterprises. *International Review of Financial Analysis*, 36, 153–167. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.12.006>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Faccio, M., Dinç, S., Djankov, S., Fisman, R., Giannetti, M., Green, R., Gresik, T., Kim, E. H., Lasfer, M., Masulis, R., Mauro, P., Mcconnell, J., Mitton, T., Morck, R., Parsley, D., Rose-Ackerman, S., Schultz, P., Shleifer, A., & Stolin, D. (2006). *Faccio2010 - Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms\_A Cross-Country Analysis.pdf*, 1, 905–927.
- Faccio, M., Masulis, R. W., & Mcconnell, J. J. (2006). American Finance Association Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635.
- Falk, R. (2007). Measuring the effects of public support schemes on firms' innovation activities. Survey evidence from Austria. *Research Policy*, 36(5), 665–679. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.005>
- Ferguson, T., & Voth, H. J. (2008). Betting on Hitler - The value of political connections in Nazi Germany. *Quarterly Journal of Economics*, 123(1), 101–137. <https://doi.org/10.1162/qjec.2008.123.1.101>
- Ferris, S. P., Houston, R., & Ferris, S. P. (2016). *Working Paper Friends in the Right Places : by University of Missouri. August.*
- Francis, B. B., Hasan, I., & Sun, X. (2009). Political connections and the process of going public: Evidence from China. *Journal of International Money and Finance*, 28(4), 696–719. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2009.01.002>
- Gao, W., Huang, Z., & Yang, P. (2019). Political connections, corporate governance and M&A performance: Evidence from Chinese family firms. *Research in International Business and Finance*, 50(April), 38–53. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.04.007>
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value. *Review of Financial Studies*, 22(6), 2331–2360. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088>
- Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. (2014). Auditor choice in politically connected firms.

- Journal of Accounting Research*, 52(1), 107–162. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12032>
- H Kara, O. A. M. A. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- He, L., Wan, H., & Zhou, X. (2014). How are political connections valued in China? Evidence from market reaction to CEO succession. *International Review of Financial Analysis*, 36, 141–152. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2014.01.011>
- Hillman, A. J., & Hitt, M. A. (1999). Corporate political strategy formulation: A model of approach, participation, and strategy decisions. *Academy of Management Review*, 24(4), 825–842. <https://doi.org/10.5465/AMR.1999.2553256>
- Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). Resource dependence theory: A review. *Journal of Management*, 35(6), 1404–1427. <https://doi.org/10.1177/0149206309343469>
- Holmstrom, B. (1989). Agency costs and innovation. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 12(3), 305–327. [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(89\)90025-5](https://doi.org/10.1016/0167-2681(89)90025-5)
- Hu, R., Karim, K., Lin, K. J., & Tan, J. (2020). Do investors want politically connected independent directors? Evidence from their forced resignations in China. *Journal of Corporate Finance*, 61(March 2018), 101421. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.11.004>
- Jaffar, R., & Abdul-Shukor, Z. (2016). The role of monitoring mechanisms towards company's performance. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 408–428. <https://doi.org/10.1108/jaee-05-2014-0021>
- Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and capital controls: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*, 67(2), 351–382. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(02\)00255-6](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00255-6)
- Legitimate, D. I. (2014). Does Isomorphism Legitimate? *The Academy of Management Journal*, 39(4), 1024–1039. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.256722&site=eds-live%0Ahttp://en.ruc.findplus.cn/?h=articles&db=edsjsr&an=edsjsr.256722>
- Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 411–439. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006>
- Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L. A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. *Journal of Development Economics*, 87(2), 283–299. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.03.001>
- Lin, C. Y., Ho, P. H., Shen, C. H., & Wang, Y. C. (2016). Political connection, government policy, and investor trading: Evidence from an emerging market. *International Review of Economics and Finance*, 42, 153–166. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.09.008>
- Ling, L., Zhou, X., Liang, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. *Finance Research Letters*, 18, 328–333. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009>
- Luo, J. hui, Gong, M., Lin, Y., & Fang, Q. (2016). Political connections and stock price crash risk: Evidence from China. *Economics Letters*, 147, 90–92. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.08.024>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Mohammed, N. F., Ahmed, K., & Ji, X. D. (2017). Accounting conservatism, corporate governance and political connections. *Asian Review of Accounting*, 25(2), 288–318. <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2016-0041>
- Nys, E., Tarazi, A., & Trinugroho, I. (2014). Political connections, bank deposits, and formal deposit insurance. *Journal of Financial Stability*, 19, 83–104. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.01.004>
- Ozer, M., Alakent, E., & Ahsan, M. (2010). Institutional Ownership and Corporate Political

- Strategies: Does Heterogeneity of Institutional Owners Matter? *Strategic Management Review*, 4(1), 18–29. <http://strategicmanagementreview.com/doi/abs/10.4128/1930-4560-4.1.18>
- Putra, F. K. G., & Harymawan, I. (2021). Political connections: a literature review approach. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 83. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2327>
- Qian, W., & Chen, X. (2021). Corporate environmental disclosure and political connection in regulatory and leadership changes: The case of China. *British Accounting Review*, 53(1), 100935. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100935>
- Qian, X., Zhang, G., & Liu, H. (2015). Officials on boards and the prudential behavior of banks: Evidence from China's city commercial banks. *China Economic Review*, 32, 84–96. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.11.010>
- Raymond Fisman. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/aer.91.4.1095>
- Ren, T., Yu, X., Li, X., & Lv, P. (2022). Political connections, internet use, and firm innovation. *Computers in Human Behavior Reports*, 7(March), 100211. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100211>
- Sapienza, P. (2004). The effects of government ownership on bank lending. *Journal of Financial Economics*, 72(2), 357–384. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2002.10.002>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Shleifer1994. *The Quarterly Journal of Economics*, November, 995–1025.
- Su, Z. qin, Xiao, Z., & Yu, L. (2019). Do political connections enhance or impede corporate innovation? *International Review of Economics and Finance*, 63(May 2018), 94–110. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.08.012>
- Sun, P., Hu, H. W., & Hillman, A. J. (2014). The Dark Side of Board Political Capital: Enabling Blockholder Rent Appropriation. *Academy of Management Journal*. The Dark Side of Board Political Capital: Enabling Blockholder Rent Appropriation. In *Journal: Academy of Management Journal Manuscript ID*.
- Sutopo, B., Trinugroho, I., & Damayanti, S. M. (2017). Politically Connected Banks: Some Evidence. *International Journal of Business and Society*, 18(1), 83–94.
- Tsai, L. C., Zhang, R., & Zhao, C. (2019). Political connections, network centrality and firm innovation. *Finance Research Letters*, 28(May 2018), 180–184. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.016>
- Wang, F., Xu, L., Zhang, J., & Shu, W. (2018). Political connections, internal control and firm value: Evidence from China's anti-corruption campaign. *Journal of Business Research*, 86(January), 53–67. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.045>
- Wang, Y., Yao, C., & Kang, D. (2019). Political connections and firm performance: Evidence from government officials' site visits. *Pacific Basin Finance Journal*, 57(May 2018), 101021. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.05.003>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>
- Wulandari, T., & Raharja. (2013). Analisis Pengaruh Political Connection Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume*, 2(1), 141–152.
- Xu, X., & Yan, Y. (2020). Effect of political connection on corporate environmental investment: evidence from Chinese private firms. *Applied Economics Letters*, 27(18), 1515–1521. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1693692>

- 
- Yu, X., & Zheng, Y. (2019). The value of political ties for firms experiencing enforcement actions: Evidence from China. *British Accounting Review*, 51(1), 24–45. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.08.001>
- Zhang, L., Ye, F., Yang, L., & Zhou, G. (2019). Impact of political connections on corporate environmental performance: From a green development perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/su11051317>